

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah profitabilitas, mekanisme *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap agresifitas pajak. Penelitian ini dilakukan menggunakan data laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Data yang digunakan adalah data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

Dari hasil penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Hasil analisis regresi linier berganda tidak mendukung hipotesis pertama bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif. Karena seharusnya hasil berbanding terbalik dengan hasil jika dilihat dari pengukuran CETR. Semakin tinggi profitabilitas semakin tinggi juga CETR maka semakin rendah tingkat suatu perusahaan melakukan tindakan pajak agresif dalam hal pembayaran pajak, maka dari itu perusahaan terhindar dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas sebuah perusahaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan

2. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode tertentu. Dan bisa diketahui bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan untuk perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak tersebut.
3. Hasil analisis regresi linier berganda mendukung hipotesis kedua bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini menjelaskan bahwa Semakin besa rukuran/jumlah dewan komisaris maka akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi misalnya saja dikarenakan rendahnya kualitas koordinasi antar anggota dewan komisaris.
4. Hasil analisis regresi linier berganda mengungkapkan bahwa ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini menjelaskan bahwa adanya kerjasama yang erat antar organ perusahaan dan hanyalah formalitas syarat jumlah komite audit dari pemerintah lebih menjadi prioritas utama dalam tindakan pajak agresif. Sriwedari (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) menjelaskan bahwa keberadaan komite audit

yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM yaitu komite audit minimal berjumlah 3 orang (dengan diketuai oleh seorang dewan komisaris independen yang menjabat sebagai ketua komite audit).

5. Hasil analisis regresi linear berganda mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini dapat menjelaskan bahwa adanya benturan kepentingan (*agency theory*) akan sangat rentan terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mempunyai kepentingan menaikkan laba sebagai acuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, sedangkan pemerintah melihat kenaikan laba sebagai objek pajak yang akan ditagihkan. Benturan kepentingan ini menyebabkan timbulnya tindakan pajak agresif. perusahaan lebih memikirkan dampak yang akan diterima oleh perusahaan ketika melakukan tindakan pajak agresif. Dampak yang ditanggung oleh perusahaan akibat adanya tindakan pajak agresif yaitu sanksi atau penalti dari fiskus pajak, turunnya harga saham perusahaan, rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak (Hidayanti, 2013: 14).
6. Hasil analisis regresi linier berganda atas variabel terakhir mengungkapkan bahwa *corporate social responsibility* tidak

memiliki pengaruh terhadap tindakan pajaka agresif. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian ini yang telah dilakukan, maka implikasi dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi investor bahwa perusahaan dengan *Good Corporate Governanve* yang tinggi memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah. Sehingga bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya disarankan untuk memilih perusahaan yang memiliki struktur tata kelola perusahaan yang baik seperti memiliki proporsi komisaris independen yang tinggi.
2. Dampak langsung bagi peneliti selanjutnya pada penelitian ini adalah terjadi ketidak konsistennya hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu.

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan

1. Keterbatasan Penelitian
 - a. Sampel penelitian ini hanya perusahaan pertambangan yang di *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014 sehingga

tidak mencakup semua hasil temuan untuk seluruh perusahaan publik.

- b. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan lima komponen yaitu profitabilitas, dewan komisaris, komite audit, dewan direksi dan *corporate social responsibility* sehingga variabel independen ini hanya dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 11% dan sisanya sebesar 89% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

2. Saran Penelitian

- a. Sampel yang digunakan sebaiknya tidak hanya dari perusahaan pertambangan saja tetapi juga dari jenis industri lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian dengan menggunakan seluruh perusahaan dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa lebih memperluas rentang penelitian dan menambah objek penelitian seperti perusahaan perbankan, industri, dll. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan sampel penelitian perusahaan-perusahaan yang memperoleh peringkat CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) dari pihak IICG (*The Indonesian Institute For Corporate Governance*) sehingga pengukuran *Good Corporate Governance* lebih valid.